



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. SANGGUPRI BOCHARI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**
3. NHK : **254529**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/60 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/78 m2 di BOGOR, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m2 di BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp.
400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/100 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 234.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 199.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO X1H02N32L1A/T Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 26.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT/D1 BO2N26L2 H Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 61.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 555.665.486

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.751.165.486

III. HUTANG

Rp. 35.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.716.165.486

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.